



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 684 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang **Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang **Provinsi Sumatera Barat** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang **Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang **Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang **Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Sijunjung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Sijunjung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati Sijunjung menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Sijunjung menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Bupati Sijunjung menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Oktober 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 684 - 2023

TANGGAL 10 OKTOBER 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SIJUNJUNG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati Sijunjung dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023	6 Tahun 2023	31 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat 1 satu minggu setelah P-RKPD Provinsi di tetapkan)
2	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	004/613-614/ANG/BKAD-2023	4 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA	900/617A/BKAD-2023 7/KPTS/DPRD-2023	5 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	900/627A/BKAD-2023 8/KPTS/DPRD-2023	7 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	004/671/ANG-BKAD-2023	12 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Perubahan APBD	10/KPTS/DPRD-2023 900/740/BKAD-2023	18 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	914/739/ANG-BKAD-2023	19 September 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Bupati Sijunjung dan DPRD pada tanggal 18 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 19 September 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Bupati Sijunjung kepada DPRD Kabupaten Sijunjung pada tanggal 4 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Sijunjung dengan DPRD Kabupaten Sijunjung terhadap KUA dan PPAS Tahun 2022 pada tanggal 5 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Bupati Sijunjung kepada DPRD Kabupaten Sijunjung pada tanggal 12 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kabupaten Sijunjung dengan Bupati Sijunjung pada tanggal 18 September, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Sijunjung harus tetap konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah

Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp986.494.110.455 mengalami penambahan sebesar Rp14.626.639.279 atau 2% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp971.867.471.176.

Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp104.880.097.132 bertambah sebesar Rp7.821.002.021 atau 7% menjadi sebesar Rp112.701.099.153.
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp864.969.283.044 bertambah sebesar Rp6.195.834.858 atau 1% menjadi sebesar Rp871.165.117.902.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp986.494.110.455 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	104.880.097.132	112.701.099.153	7.821.002.021	7 %
Pajak Daerah	17.258.127.533	17.258.127.533	0	0 %
Retribusi Daerah	5.550.991.058	5.301.089.040	(249.902.018)	5 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.533.085.000	19.139.365.699	605.980.699	3 %
Lain-lain PAD yang Sah	63.537.893.541	71.002.816.881	7.464.923.340	12 %
PENDAPATAN TRANSFER	864.969.283.044	871.165.117.902	6.195.834.858	1 %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	317.236.439.000	317.307.158.367	70.719.367	0 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.722.844.044	53.857.953.535	6.125.115.491	13 %
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.018.091.000	2.627.893.400	609.802.400	30 %
Pendapatan Hibah	2.018.091.000	2.627.893.400	609.802.400	30 %
Jumlah Pendapatan	971.857.471.176	986.494.110.455	14.625.639.279	2 %

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp104.880.097.132 bertambah sebesar Rp7.821.002.021 atau atau 7% menjadi sebesar Rp112.701.099.153.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

[illegible]

Pajak Daerah	65.000.000	54.206.310	83,39	65.000.000	40.703.796	62,952	65.000.000	0,00	159,59
Pajak Mineral bukan logam dan Batuan Lainnya	250.000.000	RL 578.439	32,63	335.000.000	50.249.746	9,39	285.000.000	(250.000.000)	552,17
PBB/2	2.449.500.000	2.264.384.613	92,44	3.049.500.000	623.691.072	20,46	2.997.504.885	(141.995.115)	466,04
BUPATIS Pemindahan Jilik	3.523.178.120	4.672.391.707	132,66	1.770.378.120	428.741.432	46,81	1.770.378.120	0,00	218,62
HUMAS/Amberan Hsk Baru	581.177.796	145.610.850	25,05	581.177.796	107.309.158	18,46	581.177.796	0,00	541,59
Retribusi Overnch	5.565.301.064	8.297.941.210	59,26	5.565.301.064	1.814.651.630	32,59	5.301.089.040	(249.902.012)	292,13
Retribusi Pelayanan Pemampahan/Kebersihan	80.439.372	49.138.500	61,09	80.439.372	34.356.000	42,76	100.000.000	19.560.628	240,73
Retribusi Penyediaan Pelayanan Puri di Tepi Jalan Umum	617.262.282	33.309.500	3,78	546.708.946	5.820.000	1,69	115.840.000	(230.868.946)	1900,38
Retribusi Los	367.945.500	226.348.000	61,52	333.694.000	161.791.000	48,20	350.000.000	14.316.000	246,33
Retribusi Kasa	46.080.000	26.240.000	56,94	46.080.000	16.120.000	35,42	34.560.000	(11.520.000)	231,76
Retribusi Penghijauan Kerdusan Harmoni	455.000.000	367.820.000	80,84	475.000.000	198.600.000	41,81	479.082.400	(65.917.600)	205,08
Retribusi Pelayanan Pemeliharaan dan Jasa Pengurusan Alat Pemadatan Kerdusan	76.619.840	11.550.000	43,39	20.619.840	0,00	0,00	26.619.840	0,00	0,00
Retribusi Penyediaan Tembak	6.500.000	12.050.000	185,38	7.000.000	4.800.000	68,57	10.000.000	3.000.000	208,33
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kasa	25.339.964	10.000.000	39,46	25.339.964	4.000.000	15,79	20.000.000	(5.339.964)	500,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alas-alat Laka, Tolak, Tiribang, dan Berpengapunya	52.000.000	36.371.500	69,95	52.000.000	28.450.500	55,79	52.000.000	0,00	180,87
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Mercana -elektromikro	520.000.000	285.120.000	54,83	449.280.000	199.497.600	44,46	449.280.000	0,00	225,21
Retribusi Penyewaan Tanah dan Hengutan	4.500.000	54.000.000	1200,00	4.500.000	0,00	0,00	4.500.000	0,00	0,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	432.000.000	289.513.000	59,95	481.040.668	173.095.000	35,73	540.465.000	56.024.332	312,25
Retribusi Pemakaian Laboratorium	52.000.000	15.625.000	87,74	52.000.000	17.610.000	33,87	60.000.000	8.000.000	340,72
Retribusi Pemakaian Kerdusan Bermotor	259.632.000	48.000.000	18,49	202.100.000	10.807.000	5,34	175.180.000	(28.920.000)	1693,52
Retribusi Pemakaian Alat	1.333.725.604	981.365.000	73,78	1.525.768.990	680.762.000	44,62	1.619.535.000	93.746.010	237,90
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasir/Pertemuan yang Dikontrol	54.982.800	78.200.000	69,48	54.982.800	4.200.000	7,64	54.982.800	0,00	1309,11

Retribusi Pelayanan Tempel Khusas Pagar	18.392.400	34.362.000	166.63	200.000.000	14.583.000	7.29	200.000.000	0,00	137.46
Retribusi Pelayanan Tempel Penghapusan / Vila	7.230.000	6.700.000	92.66	7.000.000	6.030.000	79,61	10.000.000	31,58	165,29
Retribusi Pelayanan Kuchah Potong Hewan	2.210.000	1.745.000	76,96	4.464.000	1.900.000	42,34	4.464.000	0,00	206,19
Retribusi Pelayanan Tempel Rekras dan Olahraga	100.786.400	83.716.100	83,06	100.786.400	56.928.000	56,38	135.000.000	20,95	237,56
Retribusi Perjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	447.096.076	108.352.750	24,35	447.096.076	85.520.000	19,13	252.000.000	43,61	394,67
Retribusi Perjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	30.017.500	50.184.800	167,19	48.500.000	9.350.000	19,28	60.000.000	22,71	94,71
Retribusi Perjualan Produk Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman Ternak dan Ikan	119.580.000	64.856.000	54,24	119.580.000	25.205.000	21,08	119.580.000	0,00	474,43

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp17.258.127.533.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp8.584.705.199 bertambah sebesar Rp679.235.260 atau 8% menjadi sebesar Rp9.263.940.459.
- 2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula sebesar Rp600.000.000 berkurang sebesar Rp(250.000.000) atau 42% menjadi sebesar Rp350.000.000.
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) semula sebesar Rp3.049.500.000,00 berkurang sebesar Rp(141.995.115) atau 5% menjadi sebesar Rp2.907.504.885.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp5.550.991.058 berkurang sebesar Rp(249.902.018) atau (5%) menjadi sebesar Rp5.301.089.040.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp1.844.152.122 berkurang sebesar Rp(276.769.882) atau 15% menjadi sebesar Rp1.567.382.240 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum semula sebesar Rp346.708.946 berkurang sebesar Rp(230.868.946) atau 67% menjadi sebesar Rp115.840.000.
 - b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp475.000.000 berkurang sebesar Rp(65.917.600) atau 14% menjadi sebesar Rp409.082.400.
- 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp3.251.838.936 berkurang sebesar Rp(18.132.136) atau 1% menjadi sebesar Rp3.233.706.800 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah semula sebesar Rp2.268.829.658 bertambah sebesar Rp128.850.342 atau 6% menjadi sebesar Rp2.397.680.000.
 - b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga semula sebesar Rp100.786.400 bertambah sebesar Rp34.213.600 atau 34% menjadi sebesar Rp135.000.000
 - c) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah semula sebesar Rp615.176.078 berkurang sebesar Rp(183.596.078) atau 30% menjadi sebesar Rp431.580.000.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp455.000.000 bertambah sebesar Rp45.000.000 atau 10% menjadi sebesar Rp500.000.000 dengan rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka *Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sijunjung harus segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Kepala Daerah turunannya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp70.219.883.096,00 atau 66,95% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.880.097.132,00, yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp9.642.727.985,00 atau 55,87% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.258.127.533,00.
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.814.651.630,00 atau 32,69% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.550.991.058,00.

Terhadap alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Sijunjung merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp18.533.085.000 bertambah sebesar Rp605.980.699 atau 3% menjadi sebesar Rp19.139.065.699.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sijunjung sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sijunjung, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*Performance Based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Selatan, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar

Rp63.537.893.541 bertambah sebesar Rp7.464.923.340 atau 12% menjadi sebesar Rp71.002.816.881, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan semula sebesar Rp587.000.000 bertambah sebesar Rp756.000 menjadi sebesar Rp587.756.000.
- 2) Pendapatan Bunga semula sebesar Rp9.000.000.000 bertambah sebesar Rp500.000.000 atau 6% menjadi sebesar Rp9.500.000.000.
- 3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp500.000.000.
- 4) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp4.799.211.474.
- 5) Pendapatan dari Pengembalian semula tidak dianggarkan menjadi sebesar 258.202.866.
- 6) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp50.461.681.632 bertambah sebesar Rp1.404.253.000 atau 3% menjadi sebesar Rp51.865.934.632.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp864.969.283.044 bertambah sebesar Rp6.195.834.858 atau 1% menjadi sebesar Rp871.165.117.902 atau 88,31% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp817.236.439.000 bertambah sebesar Rp70.719.367 atau 1% menjadi sebesar Rp817.165.117.902 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

- 1) Dana Perimbangan semula sebesar Rp756.682.488.000 bertambah sebesar Rp70.719.367 menjadi sebesar Rp756.753.207.367 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp33.496.426.000 bertambah sebesar Rp16.119.367 menjadi sebesar Rp33.512.545.367.
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp519.775.317.000.
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp64.050.902.000.

- d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp139.359.843.000 bertambah sebesar Rp54.600.000 menjadi sebesar Rp139.414.443.000.

2) Dana Desa tetap sebesar Rp60.553.951.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten Sijunjung sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kemenkeu	
PENDAPATAN TRANSFER	864.969.283.044	871.165.117.902	871.165.117.902	0
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	817.236.439.000	817.307.158.367	817.307.158.367	0
Dana Perimbangan	756.682.488.000	756.753.207.367	756.753.207.367	0
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	33.496.426.000	33.512.545.367	33.512.545.367	0
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.651.998.000	2.651.998.000	2.651.998.000	0
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.877.168.000	3.877.168.000	3.877.168.000	0
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	42.632.000	58.751.367	58.751.367	0
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	16.683.085.000	16.683.085.000	16.683.085.000	0
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	223.852.000	223.852.000	223.852.000	0
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	7.928.772.000	7.928.772.000	7.928.772.000	0
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provial Sumber Daya Hutan (PSDH)	748.555.000	748.555.000	748.555.000	0
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.340.364.000	1.340.364.000	1.340.364.000	0
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	519.775.317.000	519.775.317.000	519.775.317.000	0
DAU	519.775.317.000	519.775.317.000	519.775.317.000	0
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.050.902.000	64.050.902.000	64.050.902.000	0
DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD	1.223.358.000	1.223.358.000	1.223.358.000	0
DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD	12.852.936.000	12.852.936.000	12.852.936.000	0
DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP	2.596.782.000	2.596.782.000	2.596.782.000	0
DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan	17.151.964.000	17.151.964.000	17.151.964.000	0
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	74.173.000	74.173.000	74.173.000	0
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengustan Sistem Kesehatan	30.151.689.000	30.151.689.000	30.151.689.000	0
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	139.359.843.000	139.414.443.000	139.414.443.000	0
DAK Non Fisik-BOS Reguler	36.683.860.000	36.738.460.000	36.738.460.000	0
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.760.000.000	1.760.000.000	1.760.000.000	0
DAK Non Fisik-TPG PNSD	66.435.846.000	66.435.846.000	66.435.846.000	0
DAK Non Fisik-Tamzil Guru PNSD	1.602.250.000	1.602.250.000	1.602.250.000	0
DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.747.400.000	5.747.400.000	5.747.400.000	0
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Keetaraan	2.069.700.000	2.069.700.000	2.069.700.000	0

DAK Non Fisik-BOSKUR BOK	7.570.106.000	7.570.106.000	7.570.106.000	0
DAK Non Fisik-BOSKUR- Pengawasan Obat dan Makanan	421.592.000	421.592.000	421.592.000	0
DAK Non Fisik-BOSKUR- Akreditasi Puskesmas	10.374.007.000	10.374.007.000	10.374.007.000	0
DAK Non Fisik-BOSKUR BOKD	3.588.673.000	3.588.673.000	3.588.673.000	0
DAK Non Fisik-PR2UAN	420.370.000	420.370.000	420.370.000	0
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	568.514.000	568.514.000	568.514.000	0
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	500.800.000	500.800.000	500.800.000	0
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perindungan Perempuan dan Anak	598.000.000	598.000.000	598.000.000	0
DAK Non Fisik-Dana Kesehatan Tanggung dan Pertanahan	918.725.000	918.725.000	918.725.000	0
Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0	0
DID	0	0	0	0
DID	0	0	0	0

Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani beberapa perubahan alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 antara lain :

- 1) Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023).
- 2) Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (sesuai Surat Direktur perimbangan keuangan Nomor S-129/PK/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana desa TA 2023 pada Website DJPK).
- 3) Serta memperhatikan peraturan, keputusan dan pemberitahuan lain terkait transfer ke daerah Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung **harus mempedomani** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum pada Portal Resmi Kementerian Keuangan tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp47.732.844.044 bertambah sebesar Rp6.125.115.491 atau 13% menjadi sebesar Rp53.857.959.535 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Bagi Hasil diuraikan hanya pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.018.091.000 bertambah sebesar Rp609.802.400 atau 30% menjadi sebesar Rp2.627.893.400.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.083.334.471.176 bertambah sebesar Rp65.217.507.849 atau 6% menjadi sebesar Rp1.148.551.979.025.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan: **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.148.551.979.025 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
BELANJA				
BELANJA OPERASI	786.701.831.700	810.769.153.367	24.067.321.667	3 %
Belanja Pegawai	480.882.841.565	459.802.984.533	(21.079.857.032)	4 %
Belanja Barang dan Jasa	282.452.211.393	315.117.453.292	32.665.241.899	12 %
Belanja Hibah	23.366.778.742	35.848.715.542	12.481.936.800	53 %
BELANJA MODAL	166.482.365.517	203.376.541.901	36.894.176.384	22 %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.163.383.607	42.145.053.516	2.981.669.909	8 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.857.900.631	75.595.782.949	19.737.882.318	35 %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.898.075.379	82.341.387.026	13.443.311.647	20 %
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.306.205.900	2.898.568.410	592.362.510	26 %
Belanja Modal Aset Lainnya	256.800.000	395.750.000	138.950.000	54 %
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	50 %
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	50 %
BELANJA TRANSFER	128.150.273.959	131.406.283.757	3.256.009.798	3 %
Belanja Bagi Hasil	2.280.911.839	2.255.921.637	(24.990.202)	1 %
Belanja Bantuan Keuangan	125.869.362.100	129.150.362.100	3.281.000.000	3 %
Jumlah Belanja	1.083.334.471.176	1.148.551.979.025	65.217.507.849	6 %

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp31.816.718.512 bertambah sebesar Rp5.938.203.397 atau 18% menjadi sebesar Rp37.754.921.909 atau 10,74% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp351.515.189.560. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp13.241.441.950 bertambah sebesar Rp1.488.985.460 atau 11% menjadi sebesar Rp14.730.427.410, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.

- c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi semula sebesar Rp7.548.752.262 bertambah sebesar Rp1.679.090.660 atau 22% menjadi sebesar Rp9.227.842.922 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp10.467.457.100 bertambah sebesar Rp1.583.096.561 atau 15% menjadi sebesar Rp12.050.553.661, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp498.939.100 bertambah sebesar Rp1.022.102.950 atau 205% menjadi sebesar Rp1.521.042.050 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

- b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp2.439.399.850 berkurang sebesar Rp(793.679.500) atau (33)% menjadi sebesar Rp1.645.720.350, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp946.899.950 bertambah sebesar Rp1.480.479.800 atau 156% menjadi sebesar Rp2.427.379.750 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

- d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp1.350.860.000 berkurang sebesar Rp(39.315.000) atau (3)% menjadi sebesar Rp1.311.545.000, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp1.131.066.300 bertambah sebesar Rp493.700.000 atau 44%% menjadi sebesar Rp1.624.766.300 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD semula sebesar Rp6.387.955.600 berkurang sebesar Rp(400.549.900) atau (6)% menjadi sebesar Rp5.987.405.700, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan semula sebesar Rp700.000.000 bertambah sebesar Rp861.966.100 atau 123% menjadi sebesar Rp1.561.966.100,

agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:

- a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tetap sebesar Rp46.493.300, untuk itu **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp77.605.800 bertambah sebesar Rp425.502.950 atau 548% menjadi sebesar Rp503.108.750, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :
- a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
 - d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan setidaknya mencapai angka 23,50% dari Belanja Dinas Pendidikan (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp4.374.738.098 berkurang sebesar Rp(916.553.873) atau (21)% menjadi sebesar Rp3.458.184.225 atau 2,51% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp137.786.629.824 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula sebesar Rp816.526.300 berkurang sebesar Rp(179.883.000) atau (22)% menjadi sebesar Rp636.643.300 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).

- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp324.730.650 berkurang sebesar Rp(137.418.950) atau (42)% menjadi sebesar Rp187.311.700, **agar ditingkatkan** anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula sebesar Rp182.883.750 berkurang sebesar Rp(3.139.200) atau (2%) menjadi sebesar Rp179.744.550 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita semula sebesar Rp704.931.221 berkurang sebesar Rp(320.256.800) atau (45%) menjadi sebesar Rp384.674.421 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar

lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi

- (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar semula sebesar Rp984.422.577 berkurang sebesar Rp(262.110.777) atau (27)% menjadi sebesar Rp722.311.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.
- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera
 - (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif semula sebesar Rp151.207.450 bertambah sebesar Rp20.367.200 atau 13% menjadi sebesar Rp171.574.650 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KTT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
- b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
- c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :

- (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
 - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut semula sebesar Rp467.969.750 bertambah sebesar Rp107.961.300 atau 23% menjadi sebesar Rp575.931.050 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.
 - d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi semula sebesar Rp226.469.000 berkurang sebesar Rp(55.981.600) atau (25)% menjadi sebesar Rp170.487.400 agar dialokasikan anggaran yang memadai pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
 - (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus semula sebesar Rp79.838.200 berkurang sebesar Rp(34.625.550) atau (43)% menjadi sebesar Rp45.212.650, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PIM dan pedoman dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
 - (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat semula sebesar Rp100.514.500 berkurang sebesar Rp(9.864.000) atau (10)% menjadi sebesar Rp90.650.500, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:
 - (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
 - (2) Edukasi.
 - (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.
 - (5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis semula sebesar Rp264.367.000 berkurang sebesar Rp(30.240.600) atau (11)% menjadi sebesar Rp234.126.400 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spiritus/bunsen, ose/lidi),

nak pengering, cartridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.

- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
 - (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV semula sebesar Rp4.374.738.098 berkurang sebesar Rp(916.553.873) atau (21)% menjadi sebesar Rp3.458.184.255 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama, bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
 - (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.

- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan selidaknya mencapai angka 2,04% dari Belanja Dinas Kesehatan (porsi penganggaran SPM Bidang Kesehatan dalam APBD Tahun 2022).

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp53.391.200 bertambah sebesar Rp896.300.000 atau 1.679% menjadi sebesar Rp949.691.200 atau 1,02% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp93.131.432.708. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut .

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp46.695.600 bertambah sebesar Rp464.628.400 atau 995% menjadi sebesar Rp511.324.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp6.695.600 bertambah sebesar Rp431.671.600 atau 6.447% menjadi sebesar Rp438.367.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum setidaknya mencapai angka 9,36% dari Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat tetap sebesar Rp133.660.350 atau 1,68% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.945.051.114 pada SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp2.484.725 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **belum dianggarkan** agar disediakan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp122.850.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :

- a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
 - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi rumah bencana, dan pembangunan rumah.
 - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp8.325.625 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat setidaknya mencapai angka 3,89% dari Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

e. SPM Trantibumlinmas

- 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana semula sebesar Rp843.033.600 bertambah sebesar Rp114.211.000 atau 26% menjadi sebesar Rp959.244.600 atau 23,72% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.043.433.214. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
 - a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota semula sebesar Rp64.253.450 bertambah sebesar Rp1.591.100 atau 2% menjadi sebesar Rp65.844.550, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana semula sebesar Rp536.179.050 bertambah sebesar Rp79.185.100 atau 15% menjadi sebesar Rp615.364.150, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp244.601.100 bertambah sebesar Rp33.434.800 atau 14% menjadi sebesar Rp278.035.900, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah semula sebesar Rp2.041.521.300 bertambah sebesar Rp685.093.450 atau 34% menjadi sebesar Rp2.726.614.750 atau 26,15% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp10.425.427.132. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp1.991.424.900 bertambah sebesar Rp735.189.850 atau 37% menjadi sebesar Rp2.726.614.750, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran semula sebesar Rp50.096.400 berkurang sebesar Rp(50.096.400) menjadi sebesar Rp0, **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia **belum dianggarkan, agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas untuk Penyelenggaraan Operasi, Standardisasi Sarana dan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Aparatur dalam rangka Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.
- 3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum semula Rp1.330.475.500 bertambah sebesar Rp286.026.900 atau 21% menjadi sebesar Rp1.616.502.400 atau 15,51% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp10.425.427.132. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :
- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar semula Rp1.330.475.500 bertambah sebesar Rp286.026.900 atau 21% menjadi sebesar Rp1.616.502.400, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
 - b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar Rp0 atau **belum dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Trantibumlinmas setidaknya mencapai angka 34,86% dari Belanja Urusan Trantibumlinmas (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten/Kota dalam Perubahan Tahun 2022).

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Trantibumlinmas belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Trantibumlinmas dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp93.907.975 bertambah sebesar Rp44.299.550 atau 47% menjadi sebesar Rp138.207.525 atau 3,41% dari total belanja SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp4.055.949.557. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial semula sebesar Rp60.542.700 bertambah sebesar Rp44.623.250 atau 74% menjadi sebesar Rp105.165.950 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
 - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
 - d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permaknaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi social dan rujukan.
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota semula sebesar Rp33.365.275 berkurang sebesar Rp(323.700) atau (1%) menjadi sebesar Rp33.041.575 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

- a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
- b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Sosial setidaknya mencapai angka 8,63% dari Belanja Urusan Sosial (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Sosial belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Sosial dimaksud.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta ***mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.***

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas

layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum. **Sehingga Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus mengalihkan alokasi belanja dari DAU yang ditentukan penggunaannya dalam Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023 untuk memenuhi kebutuhan pencapaian SPM.**

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Provinsi	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERAKHLAK MULIA, SEHAT, UNGGUL DAN BERDAYA SAING	597.825.940.192	52,05
2.	MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BERDASARKAN FALSAFAH ADAT BASANDI SYARA' , SYARA' BASANDI KITABULLAH	11.454.152.551	1,00
3.	MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	33.021.439.250	2,88
4.	MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL/MENENGAH SERTA EKONOMI BERBASIS DIGITAL	7.072.289.479	0,62
5.	MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DAN BERDAYA SAING KEPARIWISATAAN	13.514.915.235	1,18
6.	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	117.191.612.694	10,20
7.	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS	368.471.629.624	32,08
	JUMLAH	1.148.551.979.025	100,00

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah memenuhi** kriteria penyusunan daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Sijunjung Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Daerah	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERAKHLAK MULIA, SEHAT, UNGGUL DAN BERDAYA SAING	597.825.940.192,00	52,05
2.	MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BERDASARKAN PALSAPAH ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH	11.454.152.551,00	1,00
3.	MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	33.021.439.250,00	2,88
4.	MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL/MENENGAH SERTA EKONOMI BERBASIS DIGITAL	7.072.289.479,00	0,62
5.	MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DAN BERDAYA SAING KEPARIWISATAAN	13.514.915.235,00	1,18
6.	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	117.191.612.694,00	10,20
7.	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS	368.471.629.624,00	32,08
JUMLAH		1.148.551.979.025,00	100,00

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah memenuhi** kriteria penyusunan daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan prioritas provinsi Tahun 2022.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis karakter dan teknologi informasi (Prioritas 1)	362.377.229.313	31,55
2.	Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang merata dan berkeadilan (Prioritas 2)	235.021.751.531	20,46
3.	Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan (Prioritas 3)	33.021.439.250	2,88
4.	Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal (Prioritas 4)	13.514.915.235	1,18
5.	Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Koperasi dan Industri Kecil Menengah (Prioritas 5)	7.072.289.479	0,62
6.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar (Prioritas 6)	115.598.023.648	10,06
7.	Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan (Prioritas 7)	2.565.916.745	0,22
8.	Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial (Prioritas 8)	4.866.669.989	0,42
9.	Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) (Prioritas 9)	6.587.482.562	1,79
10.	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik (Prioritas 10)	367.926.261.273	32,03
JUMLAH		1.148.551.979.025	100,00

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah memenuhi** kriteria penyusunan daftar Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar mempertahankan penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp382.499.970.752 atau 35,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023

sebesar Rp1.083.334.471.176 menjadi sebesar Rp372.580.260.904 atau 32,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.148.551.979.025, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Selisih
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	363.891.100.714	351.515.189.560	(12.375.911.154)
	1) Belanja Operasi:	326.070.840.399	308.021.498.950	(18.049.341.443)
	a. belanja pegawai;	256.868.159.293	238.587.641.074	(18.280.518.219)
	b. belanja barang dan jasa;	60.239.041.106	60.190.617.882	(48.423.224)
	c. belanja hibah;	8.963.640.000	9.243.240.000	279.600.000
	d. belanja bantuan sosial;	-	-	-
	2) Belanja Modal;	37.820.260.315	43.493.690.604	5.673.430.289
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	5.573.069.150	6.644.284.100	1.071.214.950
	1) Belanja Operasi:	5.573.069.150	6.644.284.100	1.071.214.950
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	5.573.069.150	6.644.284.100	1.071.214.950
	c. belanja hibah;	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial;	-	-	-
	2) Belanja Modal;	-	-	-
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	1.404.392.187	1.454.983.766	50.591.579
	1) Belanja Operasi:	1.119.362.448	1.176.251.962	56.889.514
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	1.119.362.448	1.176.251.962	56.889.514
	c. belanja hibah;	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial;	-	-	-
	2) Belanja Modal;	285.029.739	278.731.804	(6.297.935)
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	5.631.408.701	6.815.803.478	1.184.394.777
	1) Belanja Operasi:	5.631.408.701	6.815.803.478	1.184.394.777
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	1.581.408.701	2.219.803.478	638.394.777
	c. belanja hibah;	4.050.000.000	4.596.000.000	546.000.000
	d. belanja bantuan sosial;	-	-	-
	2) Belanja Modal;	-	-	-
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	6.000.000.000	6.150.000.000	150.000.000
	1) Belanja Transfer:	6.000.000.000	6.150.000.000	150.000.000
	Belanja bantuan keuangan Daerah	6.000.000.000	6.150.000.000	150.000.000
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	-	-	-
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	382.499.970.752	372.580.260.904	(9.919.709.848)
3	Total Belanja Daerah	1.083.334.471.176	1.148.551.979.025	65.217.507.849
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	35,31%	32,44%	-2,87%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Sijunjung.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Sijunjung sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp201.570.409.809 atau 26,94% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp748.150.925.410 bertambah sebesar Rp29.180.657.259 atau 12% menjadi sebesar Rp230.751.067.068 atau 27,65% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp834.497.280.387 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Beliab
1	a. Urusan bidang Kesehatan:	198.477.428.859	227.631.273.646	29.163.844.687
	1) Belanja Operasi:	145.849.149.756	159.464.248.808	13.615.099.052
	a. belanja pegawai:	63.733.231.761	68.652.364.584	4.919.132.823
	b. belanja barang dan jasa:	82.115.917.995	90.811.884.224	8.695.966.229
	c. belanja hibah:	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial:	-	-	-
	2) Belanja Modal:	52.628.279.103	68.167.024.738	15.538.745.635
	b. Belanja pada Sub Kegiatan di Luar Urusan bidang Kesehatan yang Menunjang Kesehatan, antara lain:	3.092.980.950	3.119.793.822	26.812.572
	1) Belanja Transfer:	50.000.000	50.000.000	-
	Belanja bantuan keuangan Daerah	50.000.000	50.000.000	-
	2) Sub Kegiatan — pada SKPD —:	3.042.980.950	3.069.793.822	26.812.572
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	540.655.000	563.251.000	22.596.000
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	753.955.800	753.955.800	-
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	801.530.150	804.271.050	2.740.900
4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	369.185.500	365.936.700	(3.248.800)
5	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.837.200	13.959.572	4.122.372
6	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.968.600	56.968.600	-
7	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	753.955.800	753.955.800	-
8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	55.995.000	55.995.000	-
9	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	897.900	1.500.000	602.100
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	201.570.409.809	230.751.067.068	29.180.667.269
3	Total Belanja Daerah	1.083.334.471.176	1.148.661.979.025	65.317.607.849
4	Gaji ASN	335.183.845.766	314.064.698.638	(21.128.847.128)
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	748.150.925.410	834.497.280.387	86.346.364.977
6	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	26,94%	27,65%	0,71%

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan **prevalensi stunting** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan **prevalensi** kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya **prevalensi** *wasting* (kurus) anak balita semula sebesar Rp45.867.768.720 bertambah sebesar Rp1.299.400 atau 3% menjadi sebesar Rp47.442.999.115 atau 21% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp230.751.067.068.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp47.442.999.115 atau sekitar 4% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Untuk itu, kabupaten Sijunjung agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran untuk penanganan stunting setidaknya mencapai angka 1,32% dari APBD Kabupaten/Kota (rata-rata porsi penganggaran penanganan stunting Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp385.549.929.245 atau 37,90% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.017.145.695.268, dengan rincian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :

Tabel 10
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPOEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	RAPBD-P 2023	Selisih
1	Total Belanja Daerah	1.083.334.471.176	1.148.551.979.025	65.217.507.849
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a) belanja bagi hasil	2.280.911.859	2.255.921.657	(24.990.202)
	b) bantuan keuangan	125.869.362.100	129.150.362.100	3.281.000.000
	c) jumlah (a+b)	128.150.273.959	131.406.283.757	3.256.009.798
3	Selisih (1-2)	955.184.197.217	1.017.145.695.268	61.961.498.051
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	382.073.678.887	406.858.278.107	24.784.599.220

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp385.549.929.245, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11
Format Perhitungan Belanja Infrastuktur Daerah

NO	KOMPOEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	RAPBD-P 2023	Selisih
1.	a) Belanja Modal:	Rp 166.482.365.517	Rp 203.376.541.901	Rp 36.894.176.384
	1) tanah;	Rp -	Rp -	Rp -
	2) peralatan dan mesin;	Rp 39.163.383.607	Rp 42.145.053.516	Rp 2.981.669.909
	3) bangunan dan gedung;	Rp 55.857.900.631	Rp 75.595.782.949	Rp 19.737.882.318
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	Rp 68.898.075.379	Rp 82.341.387.025	Rp 13.443.311.647
	5) aset tetap lainnya;	Rp 2.306.205.900	Rp 2.898.568.410	Rp 592.362.510
	6) aset lainnya.	Rp 256.800.000	Rp 395.750.000	Rp 138.950.000
	b) Belanja Pemeliharaan	Rp 18.239.784.333,00	Rp 17.174.309.702,00	Rp 1.065.474.631
	Jumlah 1 = (a + b)	Rp 184.722.149.850	Rp 220.550.851.603	Rp 35.828.701.753
2.	a) Belanja Hibah;	Rp 23.366.778.742	Rp 35.848.715.542	Rp 12.481.936.800
	b) Belanja Bantuan Sosial;	Rp -	Rp -	Rp -
	c) Belanja Bantuan Keuangan.	Rp 125.869.362.100	Rp 129.150.362.100	Rp 3.281.000.000
	Jumlah 2 = (a + b + c)	Rp 149.236.140.842	Rp 164.999.077.642	Rp 15.762.936.800
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	Rp 333.958.290.692	Rp 385.549.929.245	Rp 51.591.638.553

Pemerintah Kabupaten Sijunjung **belum memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas

pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk tetap konsisten secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sijunjung semula sebesar Rp7.389.454.585 (termasuk gaji) atau 0,68% dari total belanja daerah sebesar Rp1.083.334.471.176 bertambah sebesar Rp17.610.016 (termasuk gaji) menjadi sebesar Rp1.148.551.979.025 atau 0,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.148.551.979.025

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu sekurang-kurangnya **0,75%** (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung **harus mengalokasikan** anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) Reviu Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturlitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
 - 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung semula sebesar Rp1.229.715.423 berkurang sebesar Rp(258.317.045) atau (27%) menjadi sebesar Rp971.398.378 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung **belum memenuhi** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk dapat memenuhi alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Sijunjung dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sijunjung semula sebesar Rp1.039.481.850 bertambah sebesar Rp150.703.000 atau 13% menjadi sebesar Rp1.190.184.850 atau 0,10% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sijunjung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sebagaimana yang disajikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Sijunjung sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp143.750.000 bertambah sebesar Rp36.800.000 atau 20% menjadi sebesar Rp180.550.000 atau 0,01% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud **yang memadai** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp1.347.443.792 bertambah sebesar Rp137.622.500 atau 9% menjadi sebesar Rp1.485.066.292,00 atau 0,13% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Sijunjung **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp239.259.750.731 atau 53% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp448.934.576.910 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini sudah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

- e. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tetap sebesar Rp451.725.000 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik

Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp786.701.831.700 bertambah sebesar Rp24.067.321.667 atau 3% menjadi sebesar Rp810.769.153.367 atau 70% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.148.551.979.025, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp480.882.841.565 berkurang sebesar Rp(21.079.857.032) atau (4%) menjadi sebesar Rp459.802.984.533 atau 40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp335.183.545.766 berkurang sebesar Rp(21.128.847.128) atau (6%) menjadi sebesar Rp314.054.698.638 atau 27% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1j)(1), butir D.16.a.1j)(2), butir D.16.a.1j)(3) dan butir D.16.a.1j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp13.489.296.662 bertambah sebesar Rp1 260.441.798 atau 9% menjadi sebesar Rp14.749.738.460.
 - b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp526.851.431 bertambah sebesar Rp30.016.412 atau 6% menjadi sebesar Rp556.867.843.
 - c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp1.511.102.232 bertambah sebesar Rp100.871.551 atau 7% menjadi sebesar Rp1.611.973.783.
 - d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tetap sebesar Rp105.000.000.
 - e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD tetap sebesar Rp1.727.460.
 - f) Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar Rp5.670.000.
- Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1j)(5) dan butir D.16.a.1j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp11.144.167.026 berkurang sebesar Rp(171.435.300) atau (2)% menjadi sebesar Rp10.972.731.726.

(1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp2.268.000.000.

(2) Belanja Tunjangan Reses DPRD tetap sebesar Rp567.000.000.

(3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp2.005.997.460.

(4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tetap sebesar Rp4.050.000.000.

(5) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD semula sebesar Rp40.791.306 berkurang sebesar Rp(28.229.400) atau (69)% menjadi sebesar Rp12.561.906.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp110.880.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp422.362.010 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000

dan *paling tinggi* sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN tetap sebesar Rp53.357.304.714 atau 5% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

- a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN tetap sebesar Rp47.187.727.646.
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN tetap sebesar Rp3.151.643.584.
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN tetap sebesar Rp3.017.933.484.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp75.631.017.900 berkurang sebesar Rp(210.632.822) menjadi sebesar Rp75.420.385.078.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1j)(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tetap sebesar Rp.66.435.846.000.

8) Belanja Tamsil Guru PNSD tetap sebesar Rp1.602.250.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

- a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah semula tetap sebesar Rp862.906.397 atau 5% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.258.127.533 diuraikan sebagai berikut :

- (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah tetap sebesar Rp698.954.187.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah tetap sebesar Rp163.952.210.
- b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp277.549.553 berkurang sebesar Rp(12.495.101) atau 5% menjadi sebesar Rp265.054.452 atau 5% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.301.089.040 diuraikan sebagai berikut :
- (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp224.836.798 berkurang sebesar Rp(10.142.692) atau (5)% menjadi sebesar Rp214.694.106.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp52.712.755 berkurang sebesar Rp(2.352.409) atau (4)% menjadi sebesar Rp50.360.346.

Alokasi insentif atas pemungutan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 10) Belanja Honorarium semula sebesar Rp4.945.682.915 berkurang sebesar Rp(200.490.130) atau (4%) menjadi sebesar Rp4.745.192.785 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :
- a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp4.376.852.915 berkurang sebesar Rp(200.490.130) atau (5%) menjadi sebesar Rp4.176.362.785.
- b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa tetap sebesar Rp468.830.000.
- c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) tetap sebesar Rp100.000.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)j)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp391.764.888.533 atau 34,11% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah **maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.** Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)(e)(f)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa semula sebesar Rp282.452.211.393 bertambah sebesar Rp32.665.241.899 atau 12% menjadi sebesar Rp315.117.453.292 atau 3% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp58.391.209.526 bertambah sebesar Rp8.898.857.006 atau 15% menjadi sebesar Rp67.290.066.532 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis, antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp8.155.778.757 bertambah sebesar Rp1.408.219.789 atau 17% menjadi sebesar Rp9.563.998.546.
 - b) Belanja Bahan-bahan Lainnya semula sebesar Rp3.237.368.420 bertambah sebesar Rp30.085.950
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp6.283.805.877 bertambah sebesar Rp657.416.112 atau 10% menjadi sebesar Rp6.941.221.989.
 - d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover semula sebesar Rp1.090.729.041 bertambah sebesar Rp98.163.610 atau 9% menjadi sebesar Rp1.188.892.651.

- e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer semula sebesar Rp1.324.914.210 bertambah sebesar Rp107.346.694 atau 8% menjadi sebesar Rp1.432.260.904
- f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas semula sebesar Rp1.007.141.708 bertambah sebesar Rp454.665.100 atau 45% menjadi sebesar Rp1.461.806.808
- g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula sebesar Rp2.112.763.852 bertambah sebesar Rp723.571.000 atau 34% menjadi sebesar Rp2.836.334.852
- h) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp14.487.493.554 bertambah sebesar Rp3.813.715.591 atau 26% menjadi sebesar Rp18.301.209.145.
- i) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp8.542.840.388 bertambah sebesar Rp136.920.882 atau 2% menjadi sebesar Rp8.679.761.270.
- j) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar Rp2.326.381.744 bertambah sebesar Rp1.072.867.637 atau 46% menjadi sebesar Rp3.399.249.381.
- k) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp395.615.492 bertambah sebesar Rp405.698.050 atau 103% menjadi sebesar Rp801.313.542

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp81.189.472.422 bertambah sebesar Rp6.555.976.322 atau 8% menjadi sebesar Rp87.745.448.744 yang antara lain diuraikan :
 - a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp59.426.479.012 bertambah sebesar Rp4.475.869.468 atau 8% menjadi sebesar Rp63.902.348.480 yang diuraikan antara lain :
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp4.831.015.000 bertambah sebesar Rp284.150.000 atau 6% menjadi sebesar Rp5.115.165.000.

- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp449.695.000 bertambah sebesar Rp88.995.000 atau 20% menjadi sebesar Rp538.690.000.

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)j. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp6.665.400.000 berkurang sebesar Rp(489.950.000) atau (7)% menjadi sebesar Rp6.175.450.000
- (4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp1.475.375.000 bertambah sebesar Rp125.515.000 atau 14% menjadi sebesar Rp1.475.880.000.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp1.708.439.000 berkurang sebesar Rp(232.559.000) atau (14)% menjadi sebesar Rp1.475.880.000
- (6) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan semula sebesar Rp1.026.725.000 bertambah sebesar Rp56.125.000 atau 5% menjadi sebesar Rp1.08.850.000.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp6.237.332.500 bertambah sebesar Rp1.052.335.000 atau 17% menjadi sebesar Rp7.289.667.500.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp907.050.000 bertambah sebesar Rp100.050.000 atau 11% menjadi sebesar Rp1.007.100.000.
- (9) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp6.375.653.970 bertambah sebesar Rp32.435.000 atau 1% menjadi sebesar Rp6.408.088.970.

Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk

badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga non PNS akan diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

*Apabila peruntukannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung **tidak diperkenankan** untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(10) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi semula sebesar Rp2.479.494.477 berkurang sebesar Rp(404.534.000) atau (16)% menjadi sebesar Rp2.074.960.477.

(11) Belanja Tagihan Listrik semula sebesar Rp10.499.390.793 bertambah sebesar Rp1.855.168.177 atau 18% menjadi sebesar Rp12.354.558.970.

(12) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV semula sebesar Rp2.856.985.092 berkurang sebesar (21.686.324) atau (1)% menjadi sebesar Rp2.835.298.768.

Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Lembur semula sebesar Rp3.109.267.350 bertambah sebesar Rp1.646.410.540 atau 53% menjadi sebesar Rp4.755.677.890.

Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp10.212.119.352 bertambah sebesar Rp2.444.894.864 atau 24% menjadi sebesar Rp12.657.014.216 yang diuraikan :

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp6.647.200.000 bertambah sebesar Rp8.071.560.000 atau 21% menjadi sebesar Rp8.071.560.000.
- (2) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 semula sebesar 718.793.600 bertambah sebesar Rp512.948.800 atau 71% menjadi sebesar Rp1.231.742.400.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)(iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)(v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp953.843.750 bertambah sebesar Rp256.169.356 atau 27% menjadi sebesar Rp1.210.013.106.
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp685.102.394 bertambah sebesar Rp180.621.868 atau 26% menjadi sebesar Rp865.724.262.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp887.545.000 bertambah sebesar Rp121.260.500 atau 14% menjadi sebesar Rp1.008.805.500.

- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp541.316.000 berkurang sebesar Rp(352.865.000) atau 65% menjadi sebesar Rp188.451.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah*.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- e) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp7.036.096.058 bertambah sebesar Rp1.661.514.115 atau 24% menjadi sebesar Rp8.697.610.173.
- f) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp2.234.235.000 berkurang sebesar Rp(1.358.786.625) atau (61)% menjadi sebesar Rp875.448.375.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultansi Konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- g) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp828.472.000 berkurang sebesar Rp(431.411.000) atau (52)% menjadi sebesar Rp397.061.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta

unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Sijunjung sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 847 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp18.239.784.333 berkurang sebesar Rp(1.065.474.631) atau (6%) menjadi sebesar Rp17.174.309.702 yang diuraikan pada
 - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp7.100.939.725 bertambah sebesar Rp865.274.800 atau 12% menjadi sebesar Rp7.966.214.525.
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp4.132.475.107 berkurang sebesar Rp(878.328.681) atau (21%) menjadi sebesar Rp3.254.146.426.
 - c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp7.006.369.501 berkurang sebesar Rp(1.052.420.750) atau (15%) menjadi sebesar Rp5.953.948.751.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp49.521.247.401 bertambah sebesar Rp12.469.277.750 atau 25% menjadi sebesar Rp61.990.525.151 yang diuraikan pada :
 - a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp49.171.247.401 bertambah sebesar Rp12.087.428.150 atau 25% menjadi sebesar Rp61.258.675.551.
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp350.000.000 bertambah sebesar Rp381.849.600 atau 109% menjadi sebesar Rp731.849.600.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan.

Selanjutnya **dirasionalkan** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Selanjutnya, *penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri agar tidak dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung*, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp2.024.550.000 bertambah sebesar Rp120.976.200 atau 6% menjadi sebesar Rp2.145.526.200 yang merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diuraikan pada :
 - a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula sebesar Rp1.724.550.000 bertambah sebesar Rp120.976.200 atau 7% menjadi sebesar Rp1.845.526.200.
 - b) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) tetap sebesar Rp300.000.000.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BOS semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp22.500.000.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp29.657.747.900 berkurang sebesar Rp(344.372.583) atau (1%) menjadi sebesar Rp29.313.375.317.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula sebesar Rp4.894.922.800 berkurang sebesar Rp(7.333.393) menjadi sebesar Rp4.887.589.407.
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp1.883.149.300 bertambah sebesar Rp478.863.850 atau 25% menjadi sebesar Rp2.362.013.150.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp36.585.477.874 ditambah Belanja Hibah BOS sebesar Rp2.233.040.000 menjadi sebesar Rp38.818.517.874 **tidak sama** dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.738.460.000, **tidak sesuai** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar melakukan penghitungan ulang dan menggabungkan Belanja BOS sesuai dengan target Pendapatan DAK Non Fisik BOS Tahun 2023 atau memberi penjelasan bila memanfaatkan dana BOS tahun sebelumnya.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp4.634.026.821 bertambah sebesar Rp416.145.000 atau 9% menjadi sebesar Rp5.050.171.821.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp43.428.199.811 bertambah sebesar Rp5.990.001.835 atau 14% menjadi sebesar Rp49.418.201.646.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp1.591.200.000 bertambah sebesar Rp523.087.640 atau 33% menjadi sebesar Rp2.114.287.640.
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp738.255.000 berkurang sebesar Rp(236.469.000) atau (32%) menjadi sebesar Rp501.786.000.
- 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD semula sebesar Rp70.000.000 berkurang sebesar Rp(20.000.000) atau (29%) menjadi sebesar Rp50.000.000.

Belanja BLUD sebesar Rp57.134.447.107 **lebih besar** dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp51.865.934.632. Untuk itu *agar diberikan penjelasan* karena hal ini **belum sesuai** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp23.366.778.742 bertambah sebesar Rp12.481.936.800 atau 53% menjadi sebesar Rp35.848.715.542 atau 3% dari total belanja daerah sebesar Rp1.148.551.979.025 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada :

- 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp20.520.600.000 bertambah sebesar Rp12.256.939.800 atau 60% menjadi sebesar Rp32.777.536.800.
- 2) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp2.008.040.000 bertambah sebesar Rp225.000.000 atau 11% menjadi sebesar Rp2.233.040.000.
- 3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp838.138.742.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5)a) dan butir D.16.a.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kabupaten Sijunjung baru sebesar Rp47.737.026.959 atau 4,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp838.138.742 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5)a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023 ini, sementara 60% sisanya dialokasikan pada APBD TA. 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Sijunjung sebesar Rp13.344.336.800 atau 41,25% dari total kebutuhan Pemilu/Pemilukada sebesar Rp32.347.539.000.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Sijunjung sudah memenuhi alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Sijunjung sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 ini.

Selanjutnya Bupati Sijunjung diminta untuk menjabarkan besaran alokasi Hibah untuk masing-masing penerima, baik KPU maupun Bawaslu karena yang saat ini tercantum pada Lampiran III Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sijunjung TA 2023 masih belum terinci.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp116.482.365.517 bertambah sebesar Rp36.894.176.384 atau 22% menjadi sebesar Rp203.376.541.901 atau 18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **D.16.b.1)** dan butir **D.16.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Sijunjung sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **D.16.b.9)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp39.163.383.607 bertambah sebesar Rp2.981.669.909 atau 8% menjadi sebesar Rp42.145.053.516 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :

- 1) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp810.000.000 bertambah sebesar Rp824.700.000 atau 102% menjadi sebesar Rp1.634.700.000.
 - 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp4.661.228.131 bertambah sebesar Rp1.415.299.135 atau 30% menjadi sebesar Rp6.076.527.266.
 - 3) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp2.696.468.643 bertambah sebesar Rp1.027.095.438 atau 38% menjadi sebesar Rp3.723.564.081.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp55.857.900.631 bertambah sebesar Rp19.737.882.318 atau 35% menjadi sebesar Rp75.595.782.949 dengan rincian obyek Belanja Modal Bangunan Gedung.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp68.898.075.379 bertambah sebesar Rp13.443.311.647 atau 20% menjadi sebesar Rp82.341.387.026 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp62.133.037.579 bertambah sebesar Rp8.412.868.303 atau 14% menjadi sebesar Rp70.545.905.882.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp5.578.725.800 bertambah sebesar Rp2.701.643.344 atau 48% menjadi sebesar Rp8.280.369.144.
 - 3) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp7.000.000 bertambah sebesar Rp1.163.900.000 atau 16.627% menjadi sebesar Rp1.170.900.000.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp18.279.323.053 berkurang sebesar Rp(960.310.400) atau (5)% menjadi sebesar Rp17.319.012.653.
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp5.492.873.900 berkurang sebesar Rp(92.886.921) atau 2% menjadi sebesar Rp5.399.986.979.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.000.000.000 bertambah sebesar Rp1.000.000.000 atau 50% menjadi sebesar Rp3.000.000.000 atau 0,17% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun jumlah alokasinya perlu untuk **dihitung kembali** dan nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **D.16.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp128.150.273.959 bertambah sebesar Rp3.256.009.798 menjadi sebesar Rp131.406.283.757 atau 11,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp2.280.911.859 berkurang sebesar Rp(24.990.202) menjadi sebesar Rp2.255.921.657 atau 10% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.559.216.573 diuraikan dengan rincian obyek:
 - 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp1.725.812.753 tidak mengalami penambahan atau pengurangan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 10% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.258.127.533.
 - 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp555.099.106 berkurang sebesar Rp(24.990.202) menjadi sebesar Rp530.108.904 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atau 10% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.301.089.040.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung sudah mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa, dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp125.869.362.100 bertambah sebesar Rp3.281.000.000 menjadi sebesar Rp129.150.362.100 atau 11,24% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp60.553.951.000, sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp68.596.411.100.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan tersebut **sudah memenuhi** ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp553.229.111.000 yaitu sebesar Rp55.322.911.100, atau terdapat selisih lebih sebesar Rp13.273.500.000.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar konsisten untuk menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.d.2)b)(6) dan butir D.16.d.2)b)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri :

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp114.000.000.000 bertambah sebesar Rp50.590.868.570 atau 44% menjadi sebesar Rp164.590.868.570.

Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula sebesar Rp113.000.000.000 bertambah sebesar Rp50.590.868.570 atau 45% menjadi sebesar Rp163.590.868.570.
- b. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat tetap sebesar Rp1.000.000.000,00.

Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung *wajib* menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Sijunjung *dapat* mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp2.533.000.000 terdiri dari :

- a. Penyertaan Modal Daerah tetap sebesar Rp1.533.000.000.
- b. Pemberian Pinjaman Daerah tetap sebesar Rp1.000.000.000.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **sudah** konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS

No	Keterangan	RPJMD	P - RKPD	P - KUA-PPAS	P - APBD
1.	Jumlah Program	2011 program	208 program	208 program	208 program
2.	Jumlah Kegiatan	-	572 kegiatan	572 kegiatan	572 kegiatan
3.	Jumlah Sub Kegiatan	-	1782 sub kegiatan	1782 sub kegiatan	1782 sub kegiatan
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	869.896.600.000	1.135.886.299.202	1.135.886.299.202	1.148.551.979.025

Jumlah program sebanyak 208, jumlah kegiatan sebanyak 572 dan jumlah sub kegiatan sebanyak 1.782 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD TA 2023 telah sesuai dengan jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023.

*Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung **hanya diperkenankan** melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.*

Total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.135.886.299.202 sama dengan total pagu anggaran RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2023. Total nilai PPAS Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.135.886.299.202 sama dengan total nilai PPAS sesuai dengan nota kesepakatan. Deviasi antara pagu anggaran RKPD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp40.616.189.799 atau 5% dari pagu anggaran RKPD Tahun 2023. Deviasi antara PPAS dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp7.105293.725 atau 1% dari nilai PPAS Tahun 2023.

Untuk itu, maka deviasi anggaran antara RPD dengan Rancangan APBD agar ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus konsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, RKPD, KUA, dan PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, **terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan sebagai berikut :

- A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 208 program, **tidak sama namun tidak melebihi** jumlah program yang tercantum pada RPJMD yaitu sebanyak 2011 program.
- B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp869.896.600.000 **lebih rendah** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.148.551.979.025. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp278.655.379.025 atau **32,03%** dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD **sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- D. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar memastikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023. **Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka nomor register untuk penetapan Perda Perubahan APBD 2023 tidak akan diberikan.** Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten Sijunjung menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada Perubahan APBD 2023. Dokumen resmi tersebut dapat berupa Keputusan Kepala Daerah dan/atau Rekomendasi TAPD dan/atau Rekomendasi Teknis SKPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai besaran hibah untuk KPU dan Bawaslu.
- E. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.

- F. Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. **Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga keberadaan non PNS yang mengisi jabatan pelaksana ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung saat ini diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.**
- G. Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
- H. Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI